

SKRIPSI

**PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA *INTERNATIONAL SEA-BED
AUTHORITY* DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DASAR LAUT**

DALAM MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

AHMAD ARIADI

1210111036

Pembimbing: M. Jhon, SH., MH dan Hj. Magdariza, SH., MH

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

(PK VII)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

No.reg. 4660/PK VII/I/17

**PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA *INTERNATIONAL SEA-BED AUTHORITY* DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DASAR LAUT
DALAM MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

(Ahmad Ariadi, 1210111036, Fakultas Hukum, Universita Andalas, 2016, 63 halaman)

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara besar dibidang laut dan juga sebagai anggota *International Sea-Bed Authority* maka perlu bagi Indonesia untuk menjaga dan mengawasi agar usaha-usaha penambangan di bawah dasar laut tidak menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara berkembang. Didasari hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang peranan Indonesia sebagai anggota Otorita sehingga penulis memberi judul skripsi **“PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA *INTERNATIONAL SEA-BED AUTHORITY* DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DASAR LAUT DALAM MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982.** Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipologi penelitian hukum normatif yang didukung dengan Tipologi penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui penelitian lapangan (wawancara) dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa Peranan Indonesia adalah menyetujui 15 tahun rencana kerja dalam bentuk kontrak dengan pemerintah dan swasta serta menguraikan kegiatan, mengontrol kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di daerah, dalam hal suatu ancaman lingkungan timbul dari kegiatan dasar laut mengeluarkan perintah darurat untuk mencegah bahaya termasuk perintah untuk menunda atau menyesuaikan operasi, berperan dalam berbagai aspek fungsi reguler dari *Authority*, misalnya dengan mengusulkan calon Sekretaris Jenderal, kehidupan Otorita, anggaran untuk disetujui oleh Majelis dan membuat rekomendasi untuk perakitan pada setiap kebijakan suatu hal dan Indonesia sebagai anggota dalam *International Sea-Bed Authority* mendapatkan manfaat dalam keanggotaan yakni Dapat mengakses seluruh dokumen yang berkaitan dengan sumber daya alam dasar laut dalam (Kawasan). Menjadi ajang diplomasi bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai kepentingan terkait hukum laut Internasional dalam sidang *International Sea-Bed Authority*. Mengantisipasi perkembangan kondisi dunia yang bisa mempengaruhi Indonesia, seperti negara yang mempunyai maritim besar yang mempunyai kepentingan dengan laut nusantara. Solusi yang ditawarkan yaitu Indonesia hendaknya tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan ekonomi negara maritim besar dan memprioritaskan untuk kepentingan negara-negara berkembang lebih khusus lagi negara-negara yang tidak berpantai dan Indonesia harus aktif mengikuti sidang *International Sea-Bed Authority* yang dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan-perkembangan mengenai potensi pertambangan di dasar laut juga Indonesia seharusnya lebih konsentrasi dalam keanggotaan *International Sea-Bed Authority* agar keanggotaan Indonesia tidak disalah gunakan oleh negara-negara maju.

Kata Kunci : Indonesia sebagai anggota *International Sea-Bed Authority*, Sumber Daya Alam Dasar Laut Dalam, Konvensi Hukum Laut 1982

**ROLE OF INDONESIA AS A MEMBER OF INTERNATIONAL SEA-BED
AUTHORITY IN THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES IN THE
MARINE BASE BY UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE
SEA 1982**

(Ahmad Ariadi, 1210111036, Faculty of Law, Andalas University, 2016, 63 pages)

ABSTRACT

Indonesia as one of the major countries in the field of marine and also as a member of the *International Sea-Bed Authority* it is necessary for Indonesia to maintain and oversee that efforts under the seabed mining does not cause large losses for developing countries. Based this, the authors then interested to examine the role of Indonesia as a member of the Authority that the author gives the title of the thesis "THE ROLE OF INDONESIA AS A MEMBER OF INTERNATIONAL SEA-BED AUTHORITY IN THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES IN THE MARINE BASE BY UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982. The typology of research used in research this is the typology of normative legal research was supported by the typology of empirical legal research. The nature of the research is descriptive analysis. Source data used are primary data through field research (interviews) and secondary data through library research. From the research results in the field can be concluded that the role of Indonesia is approved the 15-year work plan in the form of contracts with the government and private sectors as well as outlining the activities, control activities of exploration and exploitation in the area, in terms of an environmental threat arising from the seabed issued emergency orders to prevent danger including orders to suspend or adjust operations, plays a role in various aspects of the regular functioning of the Authority, for example by proposing candidates for Secretary General, the life of the Authority, the budget for approval by the assembly and make recommendations for the assembly on any policy of a thing and Indonesia as a member of the International Sea- Bed Authority the benefit of membership to access all documents related to the natural resources of the sea in (Region). Become an arena for Indonesian diplomacy in the fight for Indonesia's national interests in a variety of related interests International maritime law in the session the International Sea-Bed Authority. Anticipating the development of world conditions that could affect Indonesia, as a country that has a great maritime having an interest in the sea archipelago. Solutions offered that Indonesia should not be affected by the economic interests of big marine country and prioritize for the benefit of developing countries more particularly countries that are not locked and Indonesia must actively follow the trial the International Sea-Bed Authority conducted annually to determine developments regarding the potential for seabed mining in Indonesia is also supposed to be more concentration in the membership of the International sea-Bed Authority that Indonesia's membership is not misused by the developed countries.

Keywords: International Seabed Authority, Natural Resources in Seabed , Convention on the Law of the Sea 1982